

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Konflik berkepanjangan di Afghanistan telah menciptakan krisis kemanusiaan yang mengakibatkan korban jiwa baik itu akibat dari penyerangan militer yang dilakukan oleh pasukan Amerika Serikat ke Afghanistan maupun perlawanan “militan” dari Taliban yang membabi buta mengakibatkan kematian dan kerusakan bagi masyarakat sipil di Afghanistan sebagai korban (Mena & Hilhorst, 2020). Menurut data, perang di Afghanistan telah memakan lebih dari 350,000 korban jiwa dan mengancam 3,2 juta anak-anak yang menderita kekurangan gizi akibat bencana kelaparan (WHO, 2021). Bahkan sejak tahun 2021 menurut data misi bantuan PBB (Perserikatan Bangsa Bangsa) di Afghanistan melalui *United Nations Assistance Mission in Afghanistan* (UNAMA), terdapat korban sebanyak 5,183 warga sipil yang tewas dan mengalami cedera (Azria & Ramayani, 2022). Hal ini membuat Afghanistan menjadi salah satu negara penerima bantuan luar negeri terbanyak, terhitung sejak tahun 2011 lebih dari \$5,8 Miliar anggaran bantuan telah diterima negara ini untuk mengatasi konflik sipil dan militer (Khurun'in, 2016).

Kerusakan yang disebabkan akibat perang antara Amerika Serikat dan kelompok Taliban membuat Amerika Serikat memiliki tanggung jawab moral untuk memberikan bantuan kemanusiaan ke Afghanistan (Acerra et al., 2009). Bantuan kemanusiaan merupakan bagian dari instrumen bantuan internasional yang bertujuan untuk memenuhi norma hubungan internasional yang mewajibkan negara

kaya untuk membantu negara miskin dengan tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat negara penerima bantuan kemanusiaan (Lancaster, 2007). Bantuan internasional menysar pada pendanaan suatu negara dalam meningkatkan indikator perekonomian, keamanan, dan kestabilan politik agar memenuhi kebutuhan hidup masyarakatnya (Ghairat, 2021). Sementara itu, pada tanggal 15 Agustus 2021, Taliban berhasil menguasai seantero Afghanistan di saat yang bersamaan AS menarik seluruh sisa militer mereka di Afghanistan setelah 20 tahun invasi AS di negara tersebut (Muralidharan, S, 2021). Jatuhnya Kabul ke tangan Taliban juga meruntuhkan kekuasaan Presiden Ashraf Ghani. Rezim Ghani merupakan pemerintahan yang didukung Amerika Serikat untuk mengupayakan *Nation Building* sebagai bagian dari rekonstruksi AS untuk menumbuhkan demokrasi ke Afghanistan (Mehran, 2012).

Dalam merespons ini, Pemerintahan Joe Biden memiliki respons pragmatik yang seakan mendukung pragmatisme mereka dalam menanggapi isu Timur Tengah utamanya di Afghanistan. Joe Biden memang sejak kampanye kepresidenannya menunjukkan respons skeptis pada invasi AS ke Afghanistan dan didukung dengan beberapa pernyataannya setelah terpilih sebagai Presiden Amerika Serikat di forum publik antara lain,

*“ I said, among with others, we’d follow Osama bin Laden to the gates of hell if need be. That’s exactly what we did, and we got him. It took us close to 10 years to put President Obama’s commitment to into form. And that’s exactly what happened; Osama bin Laden was gone. That was 10 years ago. Think about that. We delivered justice to bin Laden a decade ago, and we’ve stayed in Afghanistan*

*for a decade since. Since then, our reasons for remaining in Afghanistan are becoming increasingly unclear, even as the terrorist threat that we went to fight evolved.”* (The White House, 2021).

Bahkan Biden juga secara konsisten menyinggung anggaran yang dikeluarkan untuk operasi militer di Afghanistan yang telah memakan lebih dari 2 Triliun Dolar AS sebagai sebuah kegagalan (Pruessen, 2021). Hal ini yang membuat Biden tidak lagi menganggap isu terorisme jihadis di Afghanistan sebagai prioritas utama kebijakan luar negeri mereka. Biden lebih membutuhkan alokasi anggaran AS yang berfokus pada rekonstruksi nasional pasca pandemi di 2021 (Jenkins, 2021). Perubahan fokus pemerintahan Presiden Biden ini terjadi atas respons dalam menghadapi kritikan di pemerintahan sebelumnya yang dipimpin Presiden Donald Trump yang dinyatakan gagal oleh publik dalam merespons pandemi dengan cepat (H. Mirvis, 2020).

Joe Biden sejak 2009 sebagai Wakil Presiden AS memang secara konsisten menganggap bahwa “*Nation Building*” di bawah Pemerintahan Kabul maupun oleh Taliban memiliki ketidakmampuan untuk memberikan kehadiran pemerintahan yang efektif bagi seluruh masyarakat Afghanistan (Pruessen et al., 2021, p. 2). Hal ini didukung dengan sikap politik Biden 2 hari setelah penarikan militer AS di Kabul yang akan memfokuskan kebijakan luar negeri AS terhadap Afghanistan di bawah pemerintahan Taliban pada “Bantuan Kemanusiaan” yang dilakukan melalui upaya diplomasi dan melibatkan aktor-aktor internasional untuk memenuhi kebutuhan dasar dan hak hidup wanita, anak-anak, dan masyarakat Afghanistan secara menyeluruh (The White House, 2021).

Penelitian ini akan membahas faktor yang melatarbelakangi Amerika Serikat dalam melanjutkan bantuan kemanusiaan ke Afghanistan di tengah ketidakpastian AS dalam mengakui kedaulatan pemerintahan Taliban. Pasalnya, Presiden Joe Biden ditengah sikap politik AS yang menolak mengakui kedaulatan Taliban, menandatangani perintah eksekutif (*executive order*) untuk mencairkan aset Taliban yang dibekukan di Bank Sentral AS sebesar \$7 Miliar dimana setengah dari dana tersebut digunakan untuk bantuan luar negeri ke Afghanistan (Savage, 2022). Ditambah lagi, kedua representasi AS dan Taliban sudah bertemu di Doha, Qatar pada tanggal 9-10 Oktober 2021 untuk menjalin kesepakatan yang salah satunya menyepakati bantuan kemanusiaan AS serta kepatuhan Taliban untuk memfasilitasi alokasi bantuan kemanusiaan dan bekerja sama dengan kelompok atau organisasi yang berfokus pada penyaluran bantuan kemanusiaan (Yanuar, 2021). Tetapi, Anthony Blinken, Menteri Luar Negeri AS mengatakan bahwa kesepakatan bantuan kemanusiaan ini akan mengecualikan pengakuan AS secara politis terhadap Taliban dan tetap melanjutkan sanksi konsisten ke Taliban sehingga alur bantuan kemanusiaan akan dialokasikan melalui pihak ketiga seperti organisasi independen, Badan Agensi Perserikatan Bangsa Bangsa dan Organisasi Non-Pemerintahan tepat seperti pidato Anthony J Blinken sebagai Menteri Luar Negeri AS saat Pidatonya tentang isu di Afghanistan:

*“The conflict has taken a terrible toll on the Afghan people. Millions are internally displaced. Millions are facing hunger, even starvation. The COVID-19 pandemic has also hit Afghanistan hard. The United States will continue to support humanitarian aid to the Afghan people. Consistent with our sanctions on the*

*Taliban, the aid will not flow through the government, but rather through independent organizations, such as UN agencies and NGOs.”* (United States Department of State, 2022).

Pasalnya, melanjutkan bantuan kemanusiaan ke Afghanistan bukan hanya saja penting untuk menegaskan posisi Amerika Serikat untuk memperbaiki kehancuran di Afghanistan setelah 20 tahun invasi tetapi juga sebagai cara dari Pemerintahan Joe Biden untuk menghindari kritik oposisi dalam dinamika perpolitikan Amerika Serikat. Joe Biden adalah presiden yang sudah memiliki niatan untuk mengakhiri invasi di Afghanistan sejak ia menjabat sebagai Wakil Presiden di masa Obama (Håkansson, 2021). Namun, kritikan utama terhadap kebijakan penarikan keseluruhan militer AS terjadi karena Biden menolak opsi untuk meninggalkan sebagian kecil kelompok militer AS demi mencegah eskalasi konflik terjadi di Kabul sehingga ini juga yang memunculkan kefrustrasian dari publik Amerika Serikat yang menyayangkan proses penarikan militer AS dari Kabul karena menempatkan keselamatan warga Afghanistan dengan risiko tinggi bahwa mereka harus terjebak di bawah pimpinan Taliban (Varshney, 2021). Kritik tentang penarikan militer AS dari Afghanistan juga terjadi karena kecemasan dunia internasional terhadap Pemerintahan Taliban yang dinilai sedang menikmati keunggulan kekuasaan bagi masa depan Afghanistan (Ganesan, 2021).

Kekosongan kekuasaan di Afghanistan setelah penarikan militer AS membuka jalan bagi kelompok Taliban untuk mengambil alih kekuasaan dan sistem pemerintahan. Tetapi bagi Taliban, tantangan untuk mendapat pengakuan kedaulatan dari dunia internasional masih sulit karena baru beberapa bulan Taliban

memimpin pemerintahan di Afghanistan, belum ada negara yang memberikan pengakuan terhadap Taliban (Aisyah, 2021). Pengakuan dunia internasional sendiri penting untuk mempertegas kedaulatan Afghanistan di bawah Pemerintah Taliban. Konsep kedaulatan sendiri penting untuk memberikan Taliban otoritas otonomi internasional sehingga posisinya dapat menjadi entitas yang merdeka dan dapat menjadi subjek di dalam sistem hukum internasional (Riyanto, 2012). Di pemerintahan Joe Biden, Amerika Serikat juga masih menerapkan sanksi pembekuan sebagian aset Taliban di *U.S. Financial Institutions Central Bank* dan \$460 Juta di *International Monetary Fund (IMF)* (Chasdi, 2021). Dalam *press release* Pidato Kenegaraan Joe Biden terkait Perintah Eksekutif (*Executive Order*) terkait pencairan aset Taliban terbaru, Pemerintahan Biden juga masih menyita setengah aset *Da Afghanistan Bank (DAB)* sebesar \$3,5 Miliar yang masih ditahan di Amerika Serikat untuk memenuhi klaim legal dari keluarga korban teror 9/11 (The White House, 2022). Dengan begitu, ini akan memunculkan tantangan baru bagi Pemerintah Taliban dalam mengelola sumber daya domestik dan alur *cash flow* Afghanistan di dunia internasional.

Pada akhirnya penelitian ini akan membahas bahwa sikap dua sisi AS saling bertolak belakang dalam memahami isu di Afghanistan. Di satu sisi, Amerika Serikat lewat kebijakan luar negeri Joe Biden tidak lagi merasa bahwa Afghanistan merupakan prioritas kebijakan luar negeri mereka dan terkesan skeptis dalam melihat rezim yang dipimpin Taliban dapat memfasilitasi kesejahteraan masyarakat Afghanistan ke depannya. Namun di lain sisi, AS dipengaruhi oleh tanggung jawab moral mereka dalam membantu prospek bantuan kemanusiaan ke Afghanistan

akibat dari 20 tahun perang AS di Afghanistan yang menyebabkan kemiskinan dan kekacauan besar bagi rakyat Afghanistan.

## **1.2 Pertanyaan Penelitian**

Dari latar belakang masalah yang telah dipaparkan mengenai kebimbangan AS dalam melihat prospek kesejahteraan Afghanistan di bawah Taliban dan telah ditariknya keseluruhan pasukan AS di Afghanistan sehingga menghentikan 20 tahun invasi di Afghanistan, muncul pertanyaan besar, yakni **“Mengapa Amerika Serikat di era Presiden Joe Biden tetap melanjutkan bantuan kemanusiaan ke Afghanistan di bawah rezim Taliban?”**

## **1.3 Tujuan Penelitian**

- a. Menjelaskan kepentingan Amerika Serikat dalam melanjutkan bantuan kemanusiaan ke Afghanistan di bawah rezim Taliban.
- b. Menjelaskan motif bantuan kemanusiaan Amerika Serikat ke Afghanistan di bawah rezim Taliban.

## **1.4 Manfaat Penelitian**

- a. Diharapkan dapat menyumbang rujukan penelitian yang berkaitan dengan tema penelitian kebijakan luar negeri Amerika Serikat di Afghanistan.
- b. Diharapkan dapat menambah wawasan dan informasi bagi penulis ataupun peneliti hubungan internasional terkait dengan kasus yang relevan dengan penelitian yang dibawa penulis.

- c. Diharapkan dapat menjadi bahan rujukan atau perbandingan penelitian di masa yang akan datang dengan tema dan topik yang sama.

### 1.5 Tinjauan Pustaka

Mayoritas penelitian yang mengkaji tentang bantuan kemanusiaan AS ke Afghanistan lebih berfokus pada kepentingan Amerika Serikat sebagai penggerak bantuan internasional akibat dampak dari peperangan yang sedang terjadi/"*Ongoing War*" mengakibatkan korban yang berjatuhan baik itu di masa kepemimpinan George W. Bush (2001-2009), Barack Obama (2009-2017), dan Donald Trump (2017-2021).

**Studi pustaka yang pertama** merupakan penelitian dari Zaenal Arifin berjudul "**Pengaruh Invasi Amerika Serikat Terhadap Proses Demokrasi Di Afghanistan**" yang berfokus pada tujuan Amerika Serikat untuk memanfaatkan kebijakan kemanusiaan seperti USAID sebagai proses liberalisasi dan demokratisasi di Afghanistan (Arifin, 2008). Penelitian dimulai dengan mengangkat isu dinamika perpolitikan dan sosial di Afghanistan yang kental dengan unsur agama Islam sehingga memunculkan faksi-faksi yang mendasari ajaran pokoknya berasal dari syari'ah Islam khususnya oleh Taliban (Arifin, 2008, pp. 24-26). Zaenal Arifin memberikan argumentasi penelitian bahwa meningkatnya bantuan internasional dari Amerika Serikat di tahun 2003 merupakan bagian dari *Nations-Building* dengan memodifikasi tujuan pembangunan kemanusiaan dengan tujuan militer AS sebagai bagian dari kepentingan Amerika Serikat di Afghanistan



yang pada saat itu memulai transisi pemerintahan demokrasi baru lewat Presiden Hamid Karzai (Arifin, 2008, p. 55) .

**Studi pustaka yang kedua** merupakan penelitian dari Sabana Putra Maka berjudul “*Strategic Partnership Agreement Amerika Serikat Dan Afghanistan (2012-2015)*” yang meneliti tentang kepentingan Amerika Serikat di bidang keamanan dan kepentingan strategis terhadap kerja sama dengan Afghanistan (Maka, 2017). Penelitian tersebut berfokus pada peningkatan kesejahteraan masyarakat Afghanistan di masa Presiden Hamid Karzai yang memiliki peningkatan perekonomian dikarenakan bantuan internasional yang diberikan Amerika Serikat lewat USAID (*United States Agency for International Development*) (Maka, 2017, p. 38). Selain kepentingan keamanan sebagai bagian dari *Strategic Partnership Agreement* yang dilakukan, penelitian dari Sabana Putra Maka memfokuskan argumentasi bahwa Amerika Serikat di era Presiden Barack Obama memiliki kepentingan strategis antara lain untuk menumbuhkan nilai-nilai demokrasi khususnya nilai demokrasi liberal sebagai syarat dari bantuan internasional yang dikelola oleh USAID sehingga akan menciptakan pemerintah Afghanistan yang lebih demokratis dan demi menegaskan posisi AS di Afghanistan dalam melawan ancaman Taliban (Maka, 2017, p. 60)

**Studi pustaka yang ketiga** merupakan jurnal internasional dari Laurel Miller berjudul “*Biden’s Afghanistan Withdrawal: A Verdict on the Limits of American Power*” yang memulai urgensi penelitian dengan menjabarkan kegagalan Amerika Serikat dalam meredam konflik di Afghanistan dikarenakan pemerintahan transisi yang didukung Amerika Serikat untuk menghilangkan

pengaruh Taliban diyakini gagal dalam memberikan kesejahteraan dan keamanan bagi masyarakat Afghanistan (Miller, 2021). Penelitian tersebut memiliki argumentasi besar bahwa di masa Presiden Joe Biden, kebijakan dalam menarik keseluruhan militer AS merupakan bagian dari kepentingan Amerika Serikat di bidang keamanan yang kehilangan banyak sumber daya baik dari segi militer dan pasokan senjata yang digunakan dalam 20 tahun invasi AS ke Afghanistan sehingga penarikan militer AS dibuktikan penulis sesuai dengan persepsi Joe Biden sebagai presiden yang mempertimbangkan bahwa misi perdamaian AS di Afghanistan sudah usai setelah Osama Bin Laden dieksekusi, sehingga urgensi menarik militer AS secara total merupakan bagian dari proses perdamaian antara kedua negara yang paling efektif.

**Studi pustaka yang keempat** merupakan penelitian dari Erwin Syam berjudul “**Transformasi Kebijakan Luar Negeri Amerika Serikat Di Era Trump Terhadap Taliban Dengan Pendekatan Model *Two-Level Games***” yang meneliti tentang kebijakan luar negeri Amerika Serikat di Era Presiden Trump terhadap Taliban (Syam, 2021). Penelitian ini menggunakan teori kebijakan luar negeri dalam mendukung alasan Trump dalam merampungkan perjanjian damai dengan Taliban di tahun 2020 (Syam, 2021, p. 7). Penulis berargumen bahwa Pemerintahan Trump mempertimbangkan konstituen domestik antara lain Senat dan Kongres Amerika Serikat dalam meyakinkan perumusan kebijakan perdamaian dengan Taliban dan konstituen internasional yakni Taliban dan Pemerintahan Afghanistan sebagai *platform* perundingan ratifikasi perjanjian yang dihasilkan (Syam, 2021, p. 29).

**Studi pustaka yang kelima** merupakan penelitian dari Safna Putri Purba, Reni Windiani, dan Satwika Paramastya berjudul **“Kebijakan Amerika Serikat Menyetujui Perjanjian Perdamaian dengan Taliban dan Penarikan Pasukan Amerika Serikat dari Afghanistan di Masa Kepemimpinan Donald Trump”** yang memiliki analisa bahwa Amerika Serikat di era Presiden George W. Bush, Barack Obama, dan Donald Trump memiliki pendekatan berbeda untuk menghilangkan pengaruh Taliban di Afghanistan (Purba et al., 2022). Penelitian ini beargumen bahwa perjanjian damai yang terjadi di era kepemimpinan Donald Trump dipengaruhi oleh pendirian politik Trump sejak kampanye yang ingin mengesampingkan fokus kebijakan luar negeri Amerika Serikat dalam perang terhadap terorisme sehingga intervensi Amerika Serikat di Timur Tengah sudah tidak relevan (Purba et al., 2022, p. 39).

Yang tergambar di penelitian terdahulu antara lain, yang pertama adalah posisi Amerika Serikat yang mengupayakan bantuan kemanusiaan ke Afghanistan sebagai bagian dari demokratisasi AS ke masyarakat Afghanistan lewat rezim pemerintahan non-Taliban sehingga tujuan dari bantuan internasional yang masuk juga sebagai bagian dari proses institusionalisasi masyarakat Afghanistan agar terhindar dari pengaruh Taliban. Yang belum tergambar di penelitian terdahulu adalah kepentingan Amerika Serikat dalam mengupayakan bantuan kemanusiaan di saat Taliban menjadi otoritas yang memimpin pemerintahan di Afghanistan.

Sementara penelitian ini akan mencoba menjawab faktor yang mendorong Pemerintahan Joe Biden untuk melanjutkan bantuan kemanusiaan ke Afghanistan kendati masih terdapat penolakan terhadap rezim Taliban yang baru berkuasa

dengan tidak hanya meneliti pentingnya AS sebagai entitas penyalur bantuan kemanusiaan, tetapi akan memasukkan faktor domestik dan dinamika perpolitikan Amerika Serikat di era Presiden Joe Biden yang memengaruhi dilanjutkannya kebijakan bantuan kemanusiaan ke Afghanistan serta masih mempertimbangkan determinan faktor eksternal posisi AS sebagai negara donor. Pada akhirnya, penelitian ini akan digabungkan kedua faktor, baik faktor eksternal dan faktor internal atau domestik dari posisi Amerika Serikat terkait kepentingannya dalam melanjutkan bantuan kemanusiaan ke Afghanistan sehingga akan memunculkan *output* dilanjutkannya bantuan kemanusiaan ke Afghanistan.

## **1.6 Kerangka Konseptual/Teoritis**

### **1.6.1 Realisme Neo-Klasik**

Realisme merupakan salah satu paradigma hubungan internasional yang mengartikan konsep politik internasional sebagai instrumen kepentingan negara melalui perebutan kekuasaan. Aliran Realisme berpendapat bahwa persepsi moralitas dalam sistem internasional berfokus pada kekuatan negara (Williams, M.C, 2007). Hans Morgenthau di dalam bukunya "*Politics Among Nations*" menjelaskan bahwa kebijakan luar negeri yang dilakukan suatu negara merupakan hasil dari tujuan negara dalam menggapai kekuatan nasional lewat kebebasan, keamanan, filosofi, ekonomi, dan situasi sosial (Morgenthau, H. 1948). Aliran realisme menganggap bahwa dalam memberikan analisis tentang perilaku politik suatu negara tidak dapat menggantungkan pada instrumen moralitas namun melalui kehendak negara dalam membedakan apa yang dikehendaki dan apa yang mungkin, antara apa yang diharapkan di mana pun kapan pun (Morgenthau, H. 1948). Dalam

memandang kepentingan domestik, aliran realis memandang justru otoritas yang berkuasalah yang dapat memberikan persepsi moralitas suatu negara sehingga akan selalu ada perbedaan perilaku setiap negara dalam mencapai tujuan dan kepentingannya (Asrudin, 2017).

Sementara itu, Realisme Neo-Klasik merupakan teori yang dapat menjelaskan tentang kebijakan luar negeri suatu negara. Realisme Neo-Klasik menggabungkan variabel struktur internasional dan faktor domestik yang dapat muncul utamanya dari persepsi elite sehingga akan muncul kebijakan luar negeri (Rosyidin, 2020). Realisme Neo-Klasik merupakan modifikasi dari Neo-Realisme yang hanya menggantungkan kepentingan negara dalam kebijakan luar negeri atas respons dari kondisi anarki struktur internasional sehingga variabel politik domestik dan karakteristik dari pemimpin luput dari analisis dalam memahami kebijakan luar negeri suatu negara (Ripsman, N.M et al., 2016). Realisme Neo-Klasik merupakan alternatif teori kebijakan luar negeri yang memandang bahwa negara dengan variasi kebijakan luar negerinya dapat menempatkan persepsi dari pemimpin yang muncul karena opini publik atau kritik dari oposisi politik domestik dalam kondisi internal negara sehingga dapat memengaruhi proses pembuatan kebijakan luar negeri (Ripsman, N.M et al., 2016, p. 29). *Output* dari kebijakan luar negeri suatu negara menurut Realisme Neo-Klasik juga muncul dari proses domestik politik yang kompleks sehingga dapat mengintervensi pembuatan suatu kebijakan luar negeri (Schweller, 2004).

Di dalam proses terciptanya kebijakan luar negeri, Realisme neo klasik adalah teori yang dapat menjelaskan terciptanya kebijakan luar negeri suatu

negara akibat konsekuensi variabel posisi negara di sistem internasional yang menciptakan kekuatan dan kapasitas dalam hal materi dan kemampuannya dalam memengaruhi subjek-subjek internasional dimana variabel internal dan faktor domestik yang berpengaruh merupakan jembatan dari faktor eksternal sehingga menciptakan *output* kebijakan luar negeri (Rosyidin, 2017). Kebijakan luar negeri menurut Realisme Neo-Klasik merupakan perpanjangan dari politik domestik yang dapat menggambarkan posisi suatu negara dalam merespons kondisi struktur internasional yang dihadapinya sehingga negara menghasilkan suatu kebijakan luar negeri yang menggabungkan tekanan dari lingkungan internasional dan dinamika politik domestik yang memaksa pemimpin atau suatu pemerintahan untuk menentukan sikap politiknya dalam kebijakan luar negeri yang dibuat (Lobell, S et al., 2009). Pada akhirnya, negara dalam merespons perubahan dan ketidakpastian dari situasi anarki internasional akan selalu mencari kendali untuk membentuk posisinya dalam lingkungan eksternal karena kemampuan materinya atau sumber daya yang dimiliki untuk memperluas pengaruh dan peranan mereka dalam struktur internasional dengan menggabungkan variabel domestik di dalam kebijakan luar negeri yang dihasilkan..



**Gambar 1.1 Konsep Kebijakan Luar Negeri Menurut Realisme Neoklasik**

Sumber: Integrasi Struktur Dan Unit: Teori Politik Luar Negeri Dalam Perspektif Realisme Neoklasik (Mohamad Rosyidin)

Penelitian ini menggunakan realisme neoklasik karena dapat menjelaskan alur terciptanya kebijakan luar negeri suatu negara. Realisme neoklasik memiliki premis bahwa *output* kebijakan luar negeri dapat dibentuk karena hadirnya dua interaksi antara faktor struktur internasional dan faktor politik domestik yang menciptakan persepsi bagi suatu negara untuk menggabungkan kedua faktor agar memiliki tujuan dalam menggapai tujuan negara untuk mempertahankan struktur internasional yang menanunginya. Pengaruh dominan dari faktor dinamika politik domestik juga tidak dikecualikan dimana Realisme neoklasik menjadikan persepsi elite menjadi jembatan untuk menjelaskan faktor internal yang juga mendorong terciptanya kebijakan luar negeri. Berbeda dari Realisme klasik atau Neorealisme, pandangan faktor internal suatu negara luput dari penjelasan dimana kedua teori tersebut hanya menjelaskan lewat sisi struktur internasional suatu negara yang ingin dipertahankan.

Realisme neoklasik adalah teori yang relevan di penelitian ini karena teori ini secara spesifik menjelaskan alur terciptanya kebijakan luar negeri. Berbeda dengan dua teori realisme: Realisme klasik dan Neorealisme, Realisme Neoklasik adalah teori kebijakan luar negeri bukan teori politik internasional sehingga struktur internasional merupakan determinan faktor yang mendorong persepsi elite di dalam faktor politik domestik untuk mendorong negara untuk menghasilkan suatu kebijakan luar negeri.

### 1.6.2 Konsep Politik Bantuan Internasional

Bantuan internasional pada hakikatnya berfokus pada bantuan kemanusiaan dari negara pemberi bantuan (*donor country*) kepada negara penerima bantuan (*recipient country*) untuk memenuhi aspek kemanusiaan seperti bahan pokok dan kebutuhan makanan (Hjertholm et al., 2000). Bantuan kemanusiaan pada dasarnya bersifat non-politis jika melihat dari fungsinya untuk menyelamatkan manusia dan mengakhiri krisis serta meringankan penderitaan kemanusiaan akibat krisis yang diciptakan dari situasi perang, konflik, ataupun bencana alam (Sandra, 2008). Sementara itu, Konsep Politik Bantuan Internasional adalah konsep yang berangkat dari teori politik tentang bantuan kemanusiaan yang digagas oleh Hans Morgenthau lewat "*A Political Theory of Foreign Aid*". Morgenthau membagi tipe bantuan internasional menjadi 6 bagian: a) *Humanitarian Foreign Aid*, b) *Subsistence Foreign Aid*, c) *Military Foreign Aid*, d) *Bribery*, e) *Prestige Foreign Aid*, dan f) *Foreign Aid for economic developement* (Morgenthau, 2012). Morgenthau berpendapat bahwa pada skenario tertentu, bantuan internasional dapat berfungsi sebagai fungsi politis oleh negara pemberi bantuan (*donor country*) dalam memberikan objektif politik bagi negara donor lewat loyalitas politik yang diemban dari hubungan kepada negara penerima bantuan yang membutuhkan peningkatan ekonomi bagi masyarakatnya (Morgenthau, 2012, pp. 301). Morgenthau menggabungkan dua tipe bantuan yakni *Prestige Aid* dan *Foreign Aid for economic development* yang memiliki keterkaitan untuk memaksimalkan fungsi politis yang berpihak pada negara donor dari manfaat bantuan yang diberikan ke negara penerima bantuan (Morgenthau, 2012, pp. 303).



Gagasan Morgenthau terkait politik dari bantuan internasional juga didukung oleh Carol Lancaster lewat bukunya "*Foreign Aid: Diplomacy, Development, Domestic Politics*" yang berpendapat bahwa kepentingan politik dibalik bantuan internasional khususnya yang dilakukan oleh pemerintah Amerika Serikat sejak era Presiden Harry Truman adalah akibat dari kekhasan politik domestik yang dapat membangun persepsi politis lewat kritikan terhadap bantuan internasional sebagai salah satu kebijakan luar negeri yang dilakukan oleh Amerika Serikat (Lancaster, 2007). Konsep politik dari bantuan internasional juga didukung oleh Ngaire Woods di jurnalnya yang berjudul "*The Shifting Politics of Foreign Aid*" yang menjelaskan bagaimana pengeluaran dari negara donor seperti Amerika Serikat untuk negara Timur Tengah seperti Afghanistan telah menghabiskan banyak pengeluaran untuk bantuan kemanusiaan yang diikuti oleh kepentingan nasional AS dalam menaikkan anggaran politik domestik baik di bidang keamanan dan sektor domestik integral lainnya (Woods, 2005).

### **1.7 Hipotesis**

Hipotesis yang digunakan penulis adalah Amerika Serikat di Era Presiden Joe Biden melanjutkan kebijakan bantuan kemanusiaan ke Afghanistan didorong atas pengaruh faktor eksternal AS sebagai negara donor yang masih penting dan untuk menghindari ketidakstabilan politik di Afghanistan di bawah rezim Taliban setelah penarikan keseluruhan militer AS. Dan untuk faktor domestik, Pemerintahan Amerika Serikat dipengaruhi oleh dua faktor, Yang pertama persepsi Joe Biden sebagai pemimpin terkait isu kebijakan luar negeri di Afghanistan yang ingin meninggalkan kesan baik setelah penarikan keseluruhan militer AS di

Afghanistan dan yang kedua tekanan dari oposisi yang mengganggu kebijakan penarikan militer AS di Afghanistan akan menimbulkan kekacauan sehingga Pemerintahan Joe Biden ingin menjadikan bantuan kemanusiaan ke Afghanistan lebih bermanfaat bagi kesejahteraan masyarakat Afghanistan dibandingkan rezim Taliban yang belum memiliki integritas pemerintahan yang baik sehingga akan meningkatkan citra Amerika Serikat di dunia internasional dengan mempertahankan hegemoni di Afghanistan.



**Gambar 1.2 Alur Berpikir Penelitian**

### 1.8 Metode Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif dengan tipe penelitian eksplanatif. Penelitian eksplanatif menggabungkan

hubungan antar variabel dengan menggunakan kerangka teori atau konsep sebagai dasar pemikiran lalu dirumuskan dalam bentuk hipotesis (Prof. Dr. Suryana, 2012).

### **1.8.1 Tipe Penelitian**

Penelitian ini menggunakan tipe penelitian eksplanatif yang dapat menjelaskan perilaku atau suatu fenomena yang diteliti. Dengan begitu, penelitian eksplanatif dapat menjelaskan hubungan sebab akibat dari peristiwa yang diteliti dengan mengetahui hubungan kausal antarperistiwa sehingga dapat menjelaskan jawaban dari terjadinya suatu peristiwa (Sugeng, 2022). Di dalam penelitian ini, penulis akan menjawab penyebab dari dilanjutkannya bantuan kemanusiaan Amerika Serikat era Presiden Joe Biden ke Afghanistan dibawah rezim Taliban.

### **1.8.2 Situs Penelitian**

Dalam penelitian ini, penulis melakukan penelitian *desk research* dimana sumber data yang diperoleh tetap mempertimbangkan cakupan subjek sumber penelitian dalam cakupan internasional sehingga dengan situs penelitian yang meneliti suatu fenomena internasional tidak memungkinkan penulis untuk datang ke lapangan dan meneliti langsung. Dengan begitu, sumber data kredibel berdasarkan jurnal dan artikel internasional, *press conference* dari Pemerintah Amerika Serikat lewat situs *The White House*, website resmi internasional seperti *USAID*, *UNAMA*, *UN*, *US Embassy*, *NATO*, *UNSC*, dan wawancara media terhadap pemangku kebijakan di Amerika Serikat yang terakreditasi dan kredibel akan menjadi referensi di dalam penelitian ini.

### **1.8.3 Subjek Penelitian**

Subjek penelitian ini antara lain: Pemerintah Amerika Serikat, Presiden Joe Biden, Pemerintah Afghanistan, dan Kelompok Taliban.

#### **1.8.4 Jenis Data**

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis data primer dan data sekunder. Untuk data primer, penulis mengambil data berasal dari subjek penelitian yang pengambilan datanya bersumber dari informasi yang diperoleh lewat teknik pengumpulan data. Untuk data sekunder merupakan data bersumber dari pihak lain yang bukan menjadi cakupan dalam subjek penelitian.

#### **1.8.5 Sumber Data**

Sumber data dalam penelitian ini diperoleh dari data primer dan data sekunder. Data primer menggunakan referensi dari situs resmi Pemerintah Amerika Serikat (*The White House* dan *US Embassy*), situs organisasi internasional resmi (*USAID, UNAMA, UN, NATO, UNSC*) yang menyumbang informasi dan data seperti perintah eksekutif Presiden (*President's Executive Order*), *speech address of President*, dan kebijakan yang diterapkan. Sementara untuk data sekunder adalah sumber informasi tidak langsung berasal dari artikel, buku, jurnal, penelitian, studi, dan pernyataan yang relevan dengan topik penelitian ini.

#### **1.8.6 Teknik Pengumpulan Data**

Penelitian ini akan menggunakan teknik *desk research*. Untuk mencari data sebagai penunjang penulisan penelitian, penulis mencari sumber data sekunder yang tersedia melalui sumber internet yang kemudian diolah penulis menjadi sumber dan basis data pada penelitian yang dibawa. Sumber literatur yang diambil

penulis untuk mendukung data dalam penelitian berasal dari data sekunder yang bersumber dari studi kepustakaan versi cetak maupun digital berupa buku, jurnal dan artikel yang telah terbit. Untuk data lainnya, penulis akan menggunakan referensi berasal dari cuplikan video dari sumber kredibel di internet, *press conference*, *speech address* dari sumber kredibel baik dari situs *official website* pemerintahan atau situs internet lainnya.

### **1.8.7 Teknik Analisis Data**

Penulis dalam menganalisis data di penelitian ini akan menggunakan metode kongruen. Metode kongruen sendiri merupakan teknik analisis data yang menghubungkan antara premis hipotesis dan variabel teori yang dibawa dengan penelitian yang dikaji dengan mengumpulkan data pendukung yang diseleksi dengan begitu akan terbentuk keterkaitan dalam penelitian yang dibawa oleh penulis. Penulis akan menjelaskan keterkaitan teori Realisme Neo-Klasik dalam membuktikan terciptanya kebijakan luar negeri Amerika Serikat untuk melanjutkan bantuan kemanusiaan ke Afghanistan dengan premis Realisme Neo-Klasik yang menekankan pada mekanisme dinamika politik domestik berpengaruh dalam menekan pemimpin untuk membuat kebijakan luar negeri tertentu dengan tidak mengecualikan konsepsi faktor posisi eksternal suatu negara di dalam karakteristik kebijakan luar negerinya. Hal ini akan diolah untuk menjawab pertanyaan penelitian mengapa Amerika Serikat melanjutkan bantuan internasional ke Afghanistan di bawah Pemerintah Taliban.